

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemungkinan besar akan sangat sulit untuk mengatasi kemiskinan, khususnya di negara-negara berkembang. Penggunaan istilah "kemiskinan" tidaklah menggembirakan karena tak seorang pun menginginkan hidup dalam keadaan miskin. Walaupun beberapa negara berkembang telah berhasil dalam meningkatkan hasil dan pendapatan nasional melalui upaya pembangunan yang efektif, isu kemiskinan di negara-negara tersebut adalah suatu tantangan yang kompleks. Menurut Lesiwal (2017), tingkat kesejahteraan suatu negara atau wilayah juga dapat tercermin dari tingkat kemiskinan yang dialami oleh penduduknya.

Berdasarkan (BPS, 2017), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan esensial individu dalam hal pangan dan barang-barang lainnya.

Bersifat multidimensi, kemiskinan memiliki banyak sisi yang berbeda karena kebutuhan manusia sangat beragam. Jika dilihat dari perspektif kebijakan yang luas, kemiskinan memiliki komponen-komponen dasar dan sekunder. Komponen dasar meliputi miskinnya aset, Kelemahan dalam struktur sosial-politik, pengetahuan, dan keterampilan merupakan aspek primer, sementara aspek sekunder meliputi kelemahan dalam jaringan sosial, sumber daya keuangan yang terbatas, dan kurangnya informasi. Aspek-aspek kemiskinan ini

mengakibatkan keterbatasan akses terhadap pangan, air bersih, perumahan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, dan pendidikan yang terbatas.

Beberapa alasan dapat berkontribusi pada masalah kemiskinan di daerah pedesaan, termasuk kenyataan bahwa mayoritas penduduk di wilayah tersebut hidup di bawah tingkat kemiskinan dan tidak memiliki akses terhadap lahan, sumber daya, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan layanan mereka sendiri. Selain itu, mereka tidak mampu membeli aset produksi secara mandiri. Penghasilan mereka tidak cukup untuk mendanai pembelian lahan garapan atau modal awal.

Mulyono (2017) menambahkan bahwa masalah-masalah seperti kebodohan, pengangguran, kelaparan, ketidakadilan sosial, dan kriminalitas juga dapat muncul dari kemiskinan. Selain menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan juga dapat menyebabkan berkurangnya keinginan untuk mengenyam pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dari mayoritas anak-anak yang berhenti mengenyam pendidikan, bahkan mereka yang miskin pun tidak dapat melanjutkan pendidikannya, sehingga berujung pada pengangguran dan kemiskinan.

Banyak ahli menyebutkan bahwa cara terbaik untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan membangkitkan kegiatan ekonomi di daerah tersebut untuk membangkitkan kegiatan ekonomi di daerah tersebut untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah harus menempatkan kemiskinan sebagai perhatian utama agar kemiskinan tidak semakin parah.(Yacoup, 2012).

Kualitas pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mengatasi masalah pengentasan kemiskinan, yang merupakan isu utama dalam pembangunan. Persoalan primer dalam rangka untuk menuntasi kemiskinan sekarang ini ialah kemajuan ekonomi yang tidak terdistribusi secara merata. Mengenai program-program yang telah berjalan di kota-kota besar dan kecil dan telah diadopsi secara luas, program untuk mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat adalah salah satunya.

Menurut Karasasmita dalam Zartika (2016), tingkat pendidikan yang rendah dapat berkontribusi pada kemiskinan karena membatasi potensi individu untuk berkembang dan membuat mereka lebih sulit untuk bersaing di pasar tenaga kerja yang sering kali menghargai tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat kesehatan mengakibatkan penurunan stamina fisik dan mental, yang pada gilirannya menghambat kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan preferensi. Terbatasnya opsi pekerjaan disebabkan oleh rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan.

Selanjutnya, menurut Kusnaedi seperti yang dikutip dalam Zartika (2016), tradisi seringkali menjadi kendala dalam kemajuan, bersama dengan pengeluaran yang tidak terkendali dan kekurangan keterampilan, situasi politik, serta kebijakan dari atas terkait alokasi anggaran yang tidak merata di berbagai wilayah.

Pemerintah menggunakan upaya untuk mengurangi kemiskinan sebagai salah satu programnya. Pemerintah memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program yang saat ini tersedia, yang dapat dikelola baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Program-program tersebut mencakup berbagai jenis pendekatan dalam pengentasan kemiskinan, mulai dari program bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, hingga program pemberdayaan usaha kecil, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Pemerintah pusat meluncurkan banyak program bantuan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dalam upaya mengurangi kemiskinan. Inisiatif ini melibatkan pemerintah pusat dalam menyediakan bantuan keuangan yang selanjutnya, program-program ini akan disalurkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), bersama dengan program-program bantuan langsung tunai dan bantuan tidak langsung lainnya, ialah strategi pemerintah Desa Ponre Waru untuk mengurangi kemiskinan di Desa Wolo Kab. Kolaka. Pembangunan pedesaan sangat penting bagi pembangunan nasional karena mempengaruhi sebagian besar wilayah Indonesia, menurut Adisasmita (2006). Sebagian besar populasi Indonesia menetap di wilayah pedesaan. Karenanya, perlu dilakukan peningkatan pembangunan di daerah pedesaan dengan fokus pada pengembangan keterampilan sumber daya manusia

Prinsip-prinsip pembangunan yang menyatakan bahwa semua upaya dan kegiatan pembangunan harus bermanfaat bagi masyarakat, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan individu, harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan perdesaan. Pemberian dan distribusi subsidi desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan desa.

Secara lebih spesifik, PKH bertujuan untuk memulai sistem perlindungan sosial bagi keluarga yang hidup dalam kondisi miskin dengan maksud untuk memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga tersebut, serta menghentikan siklus kemiskinan yang terus berlanjut., menurut Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pedoman umum program keluarga harapan, 2014) .

Kebijakan program keluarga harapan pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2007, serta selanjutnya berada dalam Permensos RI No. 10 tahun 2017 2017. Kebijakan tersebut kemudian direvisi dan sekarang dikenal dengan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 mengenai PKH. Menurut peraturan ini (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, 2018), bantuan sosial disalurkan dalam bentuk uang.

PKH merupakan salah satu bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika memenuhi kriteria upaya peningkatan kualitas SDM, khususnya pada kelompok masyarakat. Tindakan tersebut mencakup edukasi terkait kesehatan dan

kesejahteraan sosial, dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan mutu sumber daya manusia secara keseluruhan.

Selain PKH, terdapat program bantuan pemerintah lainnya yaitu BLT di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. BLT ini diselenggarakan sebagai bantuan pemerintah untuk meminimalisir dari efek yang ditimbulkan oleh pandemi. Kasus Covid-19 telah menyebabkan perekonomian masyarakat memburuk, yang dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup mereka. Hal tersebut diakibatkan oleh pembatasan aktivitas dalam segala aspek yang menghambat perkembangan ekonomi dan mengakibatkan hilangnya lapangan kerja. Maka, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan kebijakan BLT.

Bantuan ini berupa bantuan keuangan untuk rumah tangga yang memiliki pemasukan minim yang bersumber dari keuangan daerah. Untuk tiga bulan pertama, tiap keluarga wajib menerima sejumlah Rp. 600.000 untuk 1 bulan, dan Rp. 300.000 untuk 1 bulan selama 3 bulan berturut-turut.

Kepala desa berhak mengusulkan tambahan anggaran dana desa kepada Bupati/Walikota sebagai upaya untuk memperoleh bantuan keuangan secara langsung apabila kebutuhan desa melebihi batas maksimum yang dapat disediakan oleh masyarakat. Permintaan tersebut harus dilengkapi dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan Keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) (PPN/Bappenas 2020).

Ekonomi Islam menjelaskan bahwa manusia dilarang untuk mencuri harta sesamanya dengan cara-cara yang tidak jujur, dan secara umum, Pemerataan dan kesetaraan harus memberikan manfaat kepada semua pihak karena ketidakadilan dapat memicu permasalahan atau konflik antara individu-individu dan masyarakat secara umum. Suasana yang harmonis dan aman tanpa diskriminasi dapat terwujud dengan melakukan distribusi yang adil, memperhatikan kebutuhan kelompok yang terpinggirkan, guna mengurangi risiko konflik dan kesenjangan sosial (Rozalinda, 2014).

Desa Ponre Waru memiliki metode untuk mengurangi kemiskinan lokal dengan menggunakan tiga konsep ekonomi Islam: prinsip keseimbangan, khalifah, dan keadilan.

Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Ponre Waru untuk meningkatkan taraf hidup dan memutus mata rantai kemiskinan karena PKH dan BLT hadir di Desa Ponre Waru. Dengan adanya bantuan tersebut, perekonomian masyarakat Desa Ponre Waru sedikit banyak terbantu. Selain itu, terdapat pembangunan desa, seperti pembangunan jalan usaha tani, sistem irigasi, fasilitas kesehatan (Posyandu), BUMDes, dan organisasi tani, yang kesemuanya berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun secara tidak langsung dan tanpa adanya bantuan yang nyata.

Peneliti memilih judul "Analisis Pola Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Ponre Waru, Wolo Kec. Wolo Kab. Kolaka dalam Perspektif Ekonomi Islam" sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, yang penting untuk diteliti.

1.2. Fokus Penelitian

Penelitian harus difokuskan secara sempit untuk mencegah melenceng atau meluasnya topik, yang akan membantu perdebatan mengalir lebih mudah dan membantu tercapainya tujuan penelitian.

Penulis memfokuskan pembahasan pada bagaimana dan seperti apa pola pengentasan kemiskinan pada masyarakat Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kolaka agar tetap sesuai dengan judul penelitian.

1.3. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan lingkup masalah yang telah disebutkan sebelumnya, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Ponre Waru?
2. Bagaimana peran program penanggulangan kemiskinan di Desa Ponre Waru?
3. Dalam sudut pandang ekonomi Islam, bagaimana pola pengentasan kemiskinan di Desa Ponre Waru?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat.

1. Mengetahui bagaimana inisiatif penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Desa Ponre Waru.
2. Mengetahui fungsi yang dijalankan oleh inisiatif penanggulangan kemiskinan di masyarakat Desa Ponre Waru.

3. Mengetahui bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam menganalisis rancangan program pengentasan kemiskinan di Desa Ponre Waru.

1.5. Manfaat Penelitian

Para peneliti memperkirakan keuntungan penelitian berikut ini sebagai hasil kerja mereka:

1. Manfaat Teoritis

Wawasan dan pemahaman mengenai pola pengentasan kemiskinan di Desa Ponre Waru, diharapkan dapat bertambah dengan adanya penelitian ini. Dan diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat dikutip atau dipergunakan sebagai model untuk menghasilkan penelitian-penelitian selanjutnya di berbagai wilayah penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah perlu mempertimbangkan dan mengevaluasi program PKH, BLT, dan pembangunan desa sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.
- b. Pendamping, yang dapat menjadi rujukan untuk pengembangan pendampingan.
- c. Partisipasi masyarakat menjadi pengetahuan yang berharga dan bermanfaat untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin.

1.6. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat ini, berikut ini adalah deskripsi operasional dari penelitian ini untuk membantu memperjelas maksud dari judul tersebut di atas:

1. Analisis adalah suatu pemeriksaan atau prosedur untuk mencari pemecahan terhadap suatu peristiwa (kejadian) yang diawali dengan dugaan untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya, seperti sebab musabab terjadinya.
2. Menurut Irhami (2017), kemiskinan ialah persoalan yang selalu menjadi perhatian pemerintah di berbagai belahan dunia. Badan Pusat Statistik (2017) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Menurut Bank Dunia, kemiskinan adalah hilangnya atau berkurangnya kesejahteraan. Menurut penelitian ini, miskin berarti seseorang tidak mampu mencukupi kehidupannya dalam 1 hari atau meningkatkan taraf hidupnya.
3. Upaya untuk mengurangi, mengatasi, atau menghapuskan kemiskinan dikenal sebagai pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan membutuhkan usaha (Wimmy Haliim, 2014).
4. Diperkenalkan pada tahun 2007, PKH menawarkan bantuan sosial bersyarat kepada RTSM Sesuai dengan standar dan batasan yang telah ditetapkan, program bantuan ini mendistribusikan bantuan

tunai kepada rumah tangga sangat miskin (Kementerian Sosial, 2009).

5. BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah nama untuk program pemerintah yang membantu masyarakat yang membutuhkan dengan memberikan bantuan tunai yang tidak bersyarat maupun bersyarat. "Bantuan Langsung Tunai" tahun 2020 berasal dari TNP2K.
6. Menurut Martono (2010), perspektif adalah lensa yang digunakan seseorang untuk melihat peristiwa atau situasi saat ini.
7. Menurut Peraturan Menteri Desa tahun 2015, Tujuan utama dari pembangunan desa adalah meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah tersebut. Mengingat posisi desa dalam konteks yang lebih luas, seperti aspek sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik, penting bagi pembangunan desa untuk mempertimbangkan hubungan antar desa, desa dalam kecamatan, desa dalam kabupaten, serta antar kabupaten. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari konteks pengelolaan pembangunan daerah di tingkat kabupaten maupun provinsi. Program-program pembangunan nasional juga menempatkan pembangunan desa sebagai prioritas yang tinggi, mengingat desa sebagai fondasi dari pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan desa memiliki cakupan yang luas dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa-desa. (Wahjudin, dalam Nurman, 2015)

1.7. Sistematika Pembahasan

Materi-materi berikut ini akan digunakan untuk menjelaskan dan menyajikan temuan-temuan penelitian dalam studi ini:

BAB I PENDAHULUAN

Konteks topik, permasalahan, penekanan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan akan dibahas dalam bab ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori pada bab ini meliputi definisi kemiskinan, penyebab, karakteristik, strategi penanggulangan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan dalam ekonomi Islam, konsep PKH, BLT, dan pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan (program tidak langsung). Selain itu juga akan dipaparkan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai jenis dan metodologi penelitian, waktu dan lokasi penelitian, data dan sumber data, serta metode yang digunakan untuk menguji keakuratan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan hasil penelitian yang berupa temuan-temuan penelitian Analisis Pola Pengentasan Kemiskinan pada Masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Ditinjau dari Sudut Pandang Ekonomi Islam.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis memberikan rekomendasi dan kesimpulan berdasarkan hasil temuan penelitian.

